



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2024/Khusus - Calon PN)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
UNIT KERJA : RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI SAMBOJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. YAZID MOCHAMMAD NUR
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 925614

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 440.000.000

1. Tanah Seluas 398 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 13.000.000

1. MOTOR, HONDA MF 125 TR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 25.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 59.948.425

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 537.948.425

III. HUTANG

Rp. 378.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 159.948.425

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
UNIT KERJA : RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI SAMBOJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOCHAMMAD RIFKY LUTHFIANDI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **881560**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **620.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/36 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 405 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
4. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA KUTAI , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **123.000.000**

1. MOBIL, NISSAN X TRAIL Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, YAMAHA FAZZIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **34.030.000**

D. SURAT BERHARGA

Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **41.157.067**

F. HARTA LAINNYA

Rp. **----**

Sub Total

Rp. **818.187.067**

III. HUTANG

Rp. **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. **818.187.067**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
UNIT KERJA : RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI SAMBOJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISWANTO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIK
3. NHK : 880719

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	550.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/120 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, WARISAN Rp. 300.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2.800 m2/96 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, WARISAN Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	220.000.000
1. MOBIL, CRV 2.0 AT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	14.237.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	784.237.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	784.237.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
UNIT KERJA : RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI SAMBOJA

I. DATA PRIBADI

- Nama : IMANNUEL ROBERT
- Jabatan : KEPALA BIDANG
- NHK : 881364

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 350.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/144 m² di KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 151.000.000

- MOBIL, DAIHATSU B401RS-GQZFJ 1.2 R AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
- MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
- MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
- MOTOR, YAMAHA B6H-F A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.200.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 502.200.000

III. HUTANG Rp. 339.533.305

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 162.666.695

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.